



PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN

TA. 2025





PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 65, Lamongan, Jawa Timur 62214

Telp. (0322) 318287, Pos-el dinarpustaka@lamongankab.go.id

Laman www.lamongankab.go.id/dinarpustaka

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN

NOMOR : 000.8.2.4 / 61 /KPTS/413.122/2025

TENTANG
TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KEARSIPAN DAN
PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2025

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Tahun 2025 perlu membentuk Tim Penyusun Renja dengan menetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 90) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 02 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 02 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomer 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 nomor 11);
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 87 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lamongan Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan.

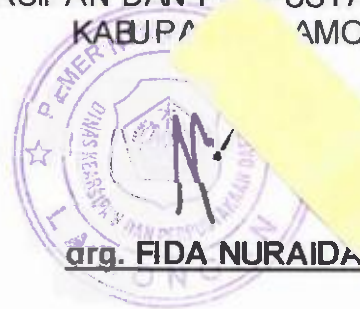
MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU :** Membentuk Susunan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA :** Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025 dimaksud dalam Diktum Kesatu dalam Keputusan ini melaksanakan tugas secara penuh dalam menyiapkan Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Tahun 2025;
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan pembenahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : 14 April 2025

KEPALA DINAS
KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN



arg. FIDA NURAIDA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN
PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 000.8.2.4/ 61 /KPTS/413.122/2025
TENTANG
TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2025

SUSUNAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2025

NO	JABATAN DALAMTIM	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	Penanggung Jawab	drg. FIDA NURAIDA, M.Kes.	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
2	Ketua	SATRIYO WIBOWO,ST.,M.M.	Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
3	Sekretaris	QOMARIYATIN, S.P.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
4	Anggota	USMAN, S.E., M.M.	Kepala Bidang Pengelolaan dan Layanan Kearsipan
		SITI ABSAH, S.H., M.M.	Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan
		RARA ARI PALUPININGRUM, S.H., M.M.	Kepala Bidang Layanan dan Pengolahan Bahan Perpustakaan
		NUR FAUZIAH, S.E.	Staf Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
		ANANG KURNIAWAN, S.E.	Staf Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
		VITA HESTI ANDRIYANTI, S.I.Pust.	Staf Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

Ditetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : 14 April 2025

KEPALA DINAS
KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN



drg. FIDA NURAIDA, M.Kes.

BABI

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja (Renja) adalah revisi atau penyesuaian terhadap dokumen Rencana Kerja yang telah disusun sebelumnya. Perubahan Renja dibuat untuk menyesuaikan dengan situasi yang berubah atau untuk memperbaiki perencanaan yang telah ada. Perubahan ini bisa mencakup penyesuaian target, indikator kinerja, alokasi anggaran, atau bahkan perubahan program dan kegiatan.

Penyusunan Perubahan Renja didasarkan pada perubahan kebijakan, hasil evaluasi kinerja, atau perkembangan situasi yang relevan. Tujuan utama perubahan Renja adalah untuk memastikan bahwa rencana kerja tetap relevan dan efektif dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja memperhatikan perkembangan serta kebutuhan masyarakat di Kabupaten Lamongan, hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan Tahun 2025 sampai pada Triwulan I dan perhitungan waktu pelaksanaan kegiatan sehingga seluruh Program dan Kegiatan dapat terlaksana dan dimanfaatkan oleh masyarakat.

RENJA Perangkat Daerah pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen RENSTRA Perangkat Daerah dan merupakan uraian lebih mendetail dari rencana strategis yang akan dilaksanakan pada setiap tahunnya dan dalam pelaksanaan RENJA dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh Perangkat Daerah serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai langkah awal untuk melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja baik keberhasilan maupun kegagalan, sehingga dapat memperbaiki dan meningkatkan kinerja sesuai dengan tuntutan perubahan dari masyarakat maupun stakeholders dan mampu menjawab tuntutan perubahan dan perkembangan lingkungan yang demikian cepat.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Sebagai landasan dalam menentukan Perubahan Renja PD adalah sebagai berikut:

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 90) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 02 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 02 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 10);

16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 87 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan.
17. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025.

1.3. Dasar Pertimbangan Perubahan

Dalam perjalanan pelaksanaan kegiatan, terdapat beberapa dinamika yang menuntut penyesuaian kegiatan sehingga harus dilakukan perubahan. Adapun alasan/pertimbangan yang mendasar dilakukan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah:

- a) Adanya perubahan kebijakan pemerintah pusat yang mengharuskan adanya perubahan Renja tahun 2025;
- b) Adanya penyesuaian perubahan anggaran tahun 2025 yang harus segera ditindaklanjuti;
- c) Adanya pergeseran pagu sub kegiatan pada rincian sub kegiatan untuk menyesuaikan kebutuhan organisasi yang harus segera dilaksanakan;
- d) Adanya penyesuaian terhadap Ranwal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029, sebagai bagian dari penyelarasan perencanaan pembangunan daerah, prioritas pembangunan, sasaran, program, dan indikator kinerja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penyusunan Perubahan Renja

Guna mempermudah dalam pemahaman Perubahan Rencana Kerja (RENJA) PD pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan, maka berikut sistematika penulisannya:

BAB 1 PENDAHULUAN, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perubahan PD agar substansi pada bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Pada bagian ini meliputi:

1.1. Latar belakang, mengemukakan pengertian ringkas tentang renja Perubahan PD, proses penyusunan renja Perubahan PD, keterkaitan antara renja Perubahan PD dengan dokumen RKPD Perubahan, Renja

Perubahan K/L dan renja Perubahan Provinsi, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

- 1.2. **Dasar Hukum Penyusunan**, memuat Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan Ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.
- 1.3. **Dasar Pertimbangan Perubahan**, memuat penjelasan tentang apa yang menjadi dasar dan acuan dari penyusunan Renja Perubahan PD.
- 1.4. **Sistematika Penyusunan Perubahan Renja**, menguraikan pokok bahasan dalam penulisan renja Perubahan PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIBULAN I TAHUN 2025

- 2.1. **Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD s/d Triwulan I tahun 2025 dan Capaian Renstra PD** menjelaskan hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (Tahun n-1 atau 2024) dan capaian tahun berjalan s/d Triwulan I dengan mengacu pada APBD tahun berjalan (2025) yang sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu, dan realisasi Renstra PD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan PD dan/atau realisasi APBD untuk PD yang bersangkutan.
- 2.2. **Analisis Kinerja Pelayanan PD**, berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019.

2.3. Isu –Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD, berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah terhadap capaian program nasional/ internasional, seperti NSPK, SPM, dan SDGs (Sustainable Development Goals);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD;
5. Formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Penelaahan Perubahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat, dalam bagian ini menguraikan hasil kajian atas perubahan program/ kegiatan diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi – asosiasi, perguruan tinggi maupun dari PD lain, berdasar hasil pengumpulan informasi PD dari penelitian lapangan dan berdasarkan pengamatan serta pelaksanaan FGD bidang teknis (bila sudah dilakukan). Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan perubahan program/ kegiatan usulan pemangku kebijakan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi PD;
3. Menyajikan tabel 2.3.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Perubahan Kebijakan Nasional dan Provinsi menjelaskan tentang hasil penelaahan terhadap kebijakan perubahan nasional dan provinsi, khususnya penelaahan yang menyangkut

perubahan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD.

3.2. Perubahan Tujuan dan Sasaran PD Tahun 2025, perumusan perubahan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD.

3.3. Perubahan Program dan Kegiatan PD tahun 2025, dan bab ini berisikan penjelasan narasi mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan perubahan program dan kegiatan;
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi perubahan program dan kegiatan;
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan RKPD Tahun 2025, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV PENUTUP, berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Kesimpulan
- b. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- c. Kaidah – kaidah pelaksanaan.
- d. Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIBULAN I TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD s/d Triwulan I Tahun 2025 dan Capaian Renstra PD

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauh mana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan dan permasalahan – permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan – kebijakan perencanaan pembangunan di tahun – tahun mendatang. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan didasarkan pada hasil evaluasi Renja Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025.

Rekapitulasi Evaluasi hasil pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Triwulan I Tahun 2025 sebagaimana tersebut dalam tabel 2.1.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD

Analisis kinerja pelayanan merupakan bentuk analisa pencapaian kinerja yang dilakukan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan. Hal ini dilakukan dengan menentukan indikator kinerja utama sebagai ukuran pencapaian kinerja yang telah di tuangkan dalam rencana strategis.

Hasil pencapaian target kinerja dari indikator kinerja yang telah ditetapkan adalah pencapaian kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan. Pencapaian ini menjadi tolak ukur kemajuan yang telah dicapai. Dari capaian ini bisa menjadi dasar sebagai pertimbangan dalam menentukan target kinerja pada tahun-tahun mendatang. Adapun analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan adalah sebagaimana tersebut dalam tabel 2.2.

No	Kode	Urusan/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)		Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2025 (s.d Trb I)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2.23	01	2.05	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Prosentase jumlah pegawai yang mendapatkan layanan kependudukan dengan baik	100,00%	159.720.000	100,00%	79.218.200	100,00%	35.000.000	-	-	0%	0,00%	100,00%	79.218.200	100,00%	49,60%		
2.23	01	2.05	Pelayanan dan Pengawasan	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	99 Orang	106.480.000	78 orang	69.868.200	82 Orang	15.000.000	-	-	0%	0,00%	78 orang	69.868.200	100,00%	65,62%		
2.23	01	2.06	Administrasi Umum	Prosentase jumlah laporan persediaan barang dan jasa yang tepat waktu	100%	312.785.000	100%	375.870.520	100%	102.800.600	13,33%	6.706.200	13,33%	6,52%	100%	382.576.720	100,00%	122,31%		
2.23	01	2.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen Instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 Jenis	26.620.000	4 paket	100.437.400	4 paket	10.000.000	1 paket	1.630.000	25%	16,20%	4 paket	102.057.400	100,00%	383,39%		
2.23	01	2.06	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	10 Jenis	26.620.000	4 paket	32.432.900	4 paket	10.000.000	1 paket	1.630.500	25%	16,31%	4 paket	34.063.400	100,00%	127,96%		
2.23	01	2.06	Penyediaan Perumahan	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	26 Jenis	33.275.000	4 paket	32.479.600	4 paket	10.000.000	1 paket	1.657.000	25%	16,57%	4 paket	34.136.600	100,00%	102,59%		
2.23	01	2.06	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	46 Jenis & 450 Box	119.790.000	5 paket	62.959.050	5 paket	12.748.600	1 paket	1.798.700	25%	14,11%	5 paket	64.157.750	100,00%	53,56%		
2.23	01	2.06	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah paket barang cetakan dan pengandaan yang disediakan	3 Jenis	26.620.000	10 paket	30.986.510	1 paket	3.832.000	-	-	0%	0,00%	10 paket	30.986.510	100,00%	116,20%		
2.23	01	2.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	10 Judul	26.620.000	1 dokumen	23.430.000	2 dokumen	15.366.000	-	-	0%	0,00%	1 dokumen	23.430.000	100,00%	88,02%		
2.23	01	2.06	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	30 Kali	53.240.000	20 laporan	93.745.060	10 laporan	40.854.000	-	-	0%	0,00%	20 laporan	93.745.060	100,00%	176,08%		
2.23	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah	Prosentase keterediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan	100%	92.740.000	100%	92.740.000	100%	64.384.400	-	-	0%	0,00%	100%	92.740.000	100,00%	100,00%		
2.23	01	2.07	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	5 unit	92.740.000	5 unit	92.740.000	7 unit	64.384.400	-	-	0%	0,00%	5 unit	92.740.000	100,00%	100,00%		
2.23	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase layanan jasa penunjang yang tersedia dengan baik	100%	1.427.201.369	100%	2.325.042.980	100%	845.145.000	25,00%	291.702.569	25,00%	34,52%	100%	2.616.745.549	100,00%	183,35%		
2.23	01	2.08	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	240 surat	3.993.000	4 laporan	5.990.000	4 laporan	3.000.000	1 laporan	-	25%	0,00%	4 laporan	5.990.000	100,00%	150,01%		
2.23	01	2.08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	5 rekening	321.566.369	12 laporan	315.857.022	12 laporan	234.834.000	3 laporan	35.682.944	25%	15,19%	12 laporan	351.539.566	100,00%	109,32%		

No	Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja RPKD s/d Tahun 2024	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi 2025 (s.d Trb I)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPKD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9= 8/7 x 100%	10= 6 x 8	11 = 10/5 x 100%	12	13
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.23	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.088.332.000	12 laporan	2.003.195.958	25%	2.259.215.583	100,00%	207,59%	
2.23	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	452.540.000	100%	646.556.249,00	34,28%	658.531.679	100,00%	145,52%	
2.23	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	133.100.000	2 unit	147.905.050	100%	155.805.230	100,00%	117,06%	
2.23	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	133.100.000	22 unit	119.497.420	45,45%	123.572.670	100,00%	92,84%	
2.23	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	53.240.000	4 unit	41.495.000	0%	41.495.000	100,00%	77,94%	
2.23	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabi litas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	133.100.000	4 unit	337.658.779,00	0%	337.658.779	150,00%	253,69%	
2.23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1.008.559.080	4,16%	2.089.963.606	95,19%	2.105.608.606	84,80%	206,77%	
2.23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	836.022.149	1.023.952 Orang	1.144.794.756	25,96%	1.115.533.156	177,71%	138,22%	
2.23	02	2.01	0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sekaligus dengan Standar Nasional Perpustakaan	20.913.568	15 perpustakaan	33.499.800	147,00%	33.499.800	105,88%	160,18%	
2.23	02	2.01	0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah/Kota		2 Perpustakaan	230.249.906	0%	230.249.906	100,00%	#DIV/0!	

No	Kode	Urusan/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD 3/3 Tahun 2024	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2025 (s.d Ttb t)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan										
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8/7 x 100%	10 = 6 + 8	11 = 10/5 x 100%	12	13										
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	K	K												
2.23	02	2.01	0012	Pengembangan Perustakaan Kabupaten/Kota yang Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perustakaan rujukan tingkat daerah kabupaten/kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi	700 jam	31.370.351	3 layanan	97.800.000	1 layanan	4.000.000	100%	6,85%	3	layanan	101.800.000	100,00%	324,51%				
2.23	02	2.01	0013	Pembinaan Perustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah perustakaan umum dan khusus yang dibuka sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan standar nasional perustakaan	2 perustakaan	1.220.500	1 perustakaan	2 perustakaan	1 perustakaan	1 perustakaan	50%	0,00%	-			100,00%	100,00%				
2.23	02	2.01	0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga perustakaan yang diingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi tenaga perustakaan dan pustakawan tingkat daerah Kabupaten/Kota	80 Orang	20.913.568	85 orang	33.089.000	25 Orang	10.000.000	0,00%	0,00%	-	85 orang	33.089.000	106,25%	158,22%				
2.23	02	2.01	0017	Penyusunan Data dan Informasi Perustakaan	Jumlah data dan informasi perustakaan	25 Perustakaan	15.885.176	60 dokumen	110.089.750	2 dokumen	1.588.100	0%	0,00%	-	60 dokumen	110.089.750	100,00%	701,87%				
2.23	02	2.01	0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perustakaan	Jumlah bahan perustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk mewujudkan keberagaman koleksi perustakaan	1300 eksemplar	20.913.568	2064 eksemplar	234.147.700	248 eksemplar	46.943.800	0,00%	0,00%	-	2064 eksemplar	234.147.700	158,76%	1119,60%				
2.23	02	2.01	0019	Pengembangan Kelembagaan Koleksi Perustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koleksi perustakaan khas daerah tingkat Kabupaten/Kota yang dikembangkan	50 Eksemplar	20.913.568	50 eksemplar	17.609.000	2 eksemplar	2.378.900	0%	62,09%	0%	50 eksemplar	19.086.000	100,00%	91,26%				
2.23	02	2.01	0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perustakaan Elektronik	Jumlah layanan perustakaan elektronik yang dikembangkan dengan manajemen layanan TIK	1 Lembaga Perustakaan	48.800.771	3 layanan	345.965.000	1 perustakaan	22.000.000	100%	23,92%	100%	3 layanan	351.227.000	100,00%	719,72%				
2.23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat gemar membaca	15000 Orang	172.536.932	36.021 orang	945.168.850	31.000 orang	111.039.600	39,12%	4,42%	36.021 orang	950.075.450	240,14%	550,65%					
2.23	02	2.02	0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/ Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/ Bunda Literasi tingkat daerah Kabupaten/ Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya	5 orang	26.141.959	5 orang	104.960.000	1 Orang	8.000.000	0%	6,88%	5 orang	105.508.500	100,00%	403,60%					
2.23	02	2.02	0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusif Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	Jumlah layanan perustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	2 Perustakaan Desa	10.456.784	2 perustakaan	27.081.000	1 perustakaan	16.759.700	0%	3,05%	2 perustakaan	27.591.800	100,00%	263,87%					

No	Kode	Urusan/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)		Capaian Kinerja RPMD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian kinerja RKPd 9/4 Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi 2023 (s.d Tbl 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd 9/4 Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPMD 9/4 Tahun 2024		Parangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9= 8/7 x 100%	10 = 6 x 8	11 = 10/5 x 100%	12	13								
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
2.23	02	2.02.0008	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-tempat umum yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/ Kota	5 sudut baca	41.827.135	2 perpustakaan	58.080.000	-	1.389.000	300,00%	1104,56%			14	462.005.750	300,00%	1104,56%			
2.23	02	2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah orang yang mendapatkan penghargaan gerakan budaya gemar membaca tingkat Kabupaten/ Kota		3 orang	5.619.500	-	-	0%	0,00%				-	0,00%	0,00%			
2.23	02	2.02.0010	Sosialisai Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Jumlah lokus pembudayaan kegemaran membaca dan literasi pada satuan pendidikan dasar dan masyarakat Kabupaten/ Kota	94.111.054	45 Lokus	22.580.000	15 Lokus	1.988.700	39,33%	8,81%				354.969.400	128,18%	377,18%			
2.23	03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO		95,00%	99.228.374	94,00%	13.974.800	93,02%	-	99,98%	0,00%				76.401.800	97,92%	77,00%			
2.23	03	2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/ Kota	1 Naskah Kuno	52.628.374	2 naskah kuno	5.172.400	-	-	0%	0,00%				48.681.600	200,00%	92,15%			
2.23	03	2.01.0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	1 Naskah Kuno	21.628.374	45 orang	1.600.000	-	-	0%	0,00%				30.681.800	100,00%	141,86%			
2.23	03		Pengembangan, Pengolahan dan Pengalimedian Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Ditarikan dan Didayagunakan	1 Naskah Kuno	31.200.000	20 eksemplar	3.572.400	-	-	0%	0,00%				18.000.000	100,00%	57,69%			
2.23	03	2.02	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang terdaftar	3 Judul	46.400.000	2 Judul	8.802.400	-	-	0%	0,00%				27.720.000	200,00%	59,76%			
2.23	03	2.02.0003	Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang diseleksi dan dilakukan pengadaan oleh Pemerintah Daerah tingkat Kabupaten/ Kota	25.800.000	30 eksemplar	5.802.400	-	-	0%	0,00%				17.720.000	100,00%	68,68%			
2.23	03	2.02.0004	Pergaulan dan Penylangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang diolah dan dilakukan penylangan oleh Pemerintah Daerah tingkat Kabupaten/ Kota	20.600.000	30 eksemplar	3.000.000	-	-	0%	0,00%				10.000.000	100,00%	48,54%			

No	Kode	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2024	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan yang dielevaluasi (2023)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD yang dievaluasi 2023 (s.d Ttb I)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024	Perangkat Daerah penanggung jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9= 8/7 x 100%	10 = 6 + 8	11 = 10/5 x 100%	12	13
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	
2	2.24	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsifan			545.573.050		83.939.000		952.317.430			
2.24	02	Program Pengelolaan Asap Darat	Persentase Tingkat Ketersediaan Asap	100%	311.366.570	80,26%	716.291.830	21,80%	5.850.700	80,26%		
2.24	02	Program Pengelolaan Asap Darat	Persentase OPD yang Memenuhi Daftar Asap Darat	100%	154.670.089	100%	236.247.730	0,00%	3.394.200	100,00%		
2.24	02	Program Pengelolaan Asap Darat	Jumlah naskah dinas yang dicetak dan digunakan	75 OPD, 75 daftar arsip, 75 daftar arsip	44.480.939	81 berkas	112.519.800	0%	2.060.800	26,41%		
2.24	02	Program Pengelolaan Asap Darat	Jumlah naskah dinas yang dijadikan pemeliharaan dan penyusutan	474 ml, 5,5 ml	44.480.940	104 berkas	39.979.770	0%	153.600	9,64%		
2.24	02	Program Pengelolaan Asap Darat	Jumlah laporan hasil pengawasan Asap di rumah kecamatan Kabupaten/kota	64 unit kecamatan OPD & 4 unit kecamatan BUMD, 64 unit kecamatan OPD & 4 unit kecamatan BUMD, 474 unit kecamatan desa, 10 Orpel 4 BUMD	65.708.210	3 laporan	85.748.160	0%	1.133.200	26,83%		
2.24	02	Program Pengelolaan Asap Darat	Jumlah OPD kabupaten/kota yang telah melakukan pengawasan kearsifan			67 Lembaga	14.153.300	0%	246.600	1,74%		
2.24	02	Program Pengelolaan Asap Darat	Persentase Asap Statis yang Telah dilakukan Sarana Bantu Tamu Balit	100%	73.041.422	86,67%	360.876.600	21,80%	2.020.400	24,22%		
2.24	02	Program Pengelolaan Asap Darat	Jumlah salinan oandak naskah asap terduga yang Oandak Naskah Asli dikumpulkan dan disampaikan kepada ANRI	1 dokumen, 5 sekolah	44.480.938	9 arsip	27.671.650	0%	384.000	18,24%		
2.24	02	Program Pengelolaan Asap Darat	Jumlah arsip statis yang dikumpulkan, pengolahan, preservasi dan akses arsip statis	600 arsip	28.560.485	375 arsip	333.204.950	23,33%	1.636.400	23,20%		
2.24	02	Program Pengelolaan Asap Darat	Persentase Asap yang Dikelola Melalui Jaringan Informasi Kearsifan	80%	83.655.259	54,00%	127.167.500	15,00%	236.100	2,68%		
2.24	02	Program Pengelolaan Asap Darat	Jumlah layanan penyediaan Informasi akses dan layanan kearsifan tingkat daerah Kabupaten/kota melalui IJKN	60 OPD	39.174.120	21 pengguna	76.062.800	0%	0	0,00%		

No	Kode	Urusan/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2024	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan yang diavaluasi (2025)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD yang diavaluasi 2025 (s.d Trb I)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9= 8/7 x 100%	10= 6+8	11= 10/5 x 100%	12	13
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.24.03.2.03.0002		Pemberdayaan Kapasitas Unit Keasrian dan Lembaga Keasrian Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pemberdayaan kapasitas unit keasrian dan lembaga keasrian daerah Kabupaten/Kota	64 OPD, 300 orang	44.480.939	2 laporan	3.651.500	0%	51.340.800	100,00%		
2.24.03.2.03.0003		Program Perlindungan dan Penyelamatan Asip	Persentase Tingkat Keberadaan dan Kebutuhan Asip sebagai Balan Pertanggungan	100%	324.821.668	90%	29.085.700	0,00%	183.257.100	80,11%		
2.24.03.2.03.0004		Pemusnahan Asip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Persentase OPD yang asipnya sudah dimusnahkan sesuai dengan NSPK	9,38%	28.120.304	7,81%	5.823.400	0,00%	42.999.300	84,59%		
2.24.03.2.03.0005		Pemusnahan Asip Yang Memiliki Retensi Di bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah asip yang memiliki retensi dibawah 10 tahun yang dimusnahkan	6 ml	10.613.636	50 berkas	3.084.100	0%	20.049.300	100,00%		
2.24.03.2.03.0006		Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Asip yang Memiliki Retensi Di bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah asip yang dilakukan penilaian, penetapan dan pelaksanaan pemusnahan asip yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun	1 laporan	17.506.668	50 asip	2.739.300	0%	22.950.000	100,00%		
2.24.03.2.03.0007		Perlindungan dan Penyelamatan Asip Akibat Bencana yang Berakibat Kabupaten/Kota	Jumlah Asip yang Diselamatkan Akibat Bencana dengan NSPK	20 berkas	21.070.419	40 berkas	9.359.000	0%	39.067.700	100,00%		
2.24.03.2.03.0008		Evaluasi dan Identifikasi Asip Akibat Bencana	Jumlah asip yang dilakukan evaluasi, identifikasi, pemulihan dan penyimpanan akibat bencana	1 laporan	10.613.636	5 asip	6.550.000	0%	19.104.700	100,00%		
2.24.03.2.03.0009		Pemulihan dan Penyimpanan Asip Akibat Bencana	Jumlah asip yang dilakukan pemulihan dan penyimpanan akibat bencana	12 asip	19.579.000	3 asip	2.809.000	0%	19.963.000	100,00%		
2.24.03.2.03.0010		Autentikasi Asip Statis dan Asip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Persentase Asip Statis yang Telah Diidentifikasi dan Asip Hasil Alih Media sesuai dengan NSPK	100%	23.869.623	83,33%	6.880.200	56,85%	56.571.400	67,08%		
2.24.03.2.03.0011		Penilaian dan Penetapan Autentikasi Asip Statis Sesuai Persyaratan Keabsahan Asip	Jumlah daftar autentikasi asip sesuai persyaratan penjaminan keabsahan asip yang dinilai dan ditetapkan			50 asip	2.496.000	20%	16.563.000	100,00%		

No	Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outputs) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2024	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2025 (s.d Trb I)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9= 8/7 x 100%	10 = 6 x 8	11 = 10/5 x 100%	12	13
				K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2.24.03	2.04.0002	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sexual Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah daftar arsip yang dilakukan penilaian dan penetapan alih media sexual persyaratan penjaminan keabsahan arsip	600 arsip 13.412.839	310 arsip 39.958.400	50 arsip 4.384.200	12 arsip 0	24,00% 0,00%	322 arsip 39.958.400	100,00% 297,91%		
2.24.03	2.05	Pencarian Arsip Status Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Arsip Status yang Diverifikasi Dinyatakan Hilang	10 arsip 31.761.322	22 arsip 43.801.900	10 arsip 7.023.100	- 866.800	0% 12,34%	22 arsip 44.668.700	100,00% 140,64%		
2.24.03	2.05.0001	Penilaian dan Penetapan Autentitas Arsip Status yang Dinyatakan Hilang	Jumlah daftar autentitas arsip status yang dinyatakan hilang yang dinilai dan ditetapkan	0	16 arsip 14.787.450	3 arsip 3.368.100	0	0,00% 0,00%	16 arsip 14.787.450	100,00% 100,00%		
2.24.03	2.05.0003	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah daftar pencarian arsip (DPA) yang dilakukan penetapan dan pengumuman	1 laporan 10.847.754	16 arsip 13.627.000	3 arsip 3.655.000	- 866.800	0% 23,72%	16 arsip 14.453.800	100,00% 133,61%		
2.24.04		PROGRAM PERIZINAN PENGUNAAN ARSIP	Prosentase tingkat kesesuaian kegiatan pemberian izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK	60,30% 109.386.812	32,26% 37.417.800	46,88% 9.110.800	0	0,00% 0,00%	32,26% 37.417.800	51,62% 34,21%		
2.24.04	2.01	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK	10 jumlah 109.386.812	21 pelayanan 37.417.800	10 pelayanan 9.110.800	0	0,00% 0,00%	21 pelayanan 37.417.800	210,00% 34,21%		
2.24.04	2.01.0003	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang diusun dan ditetapkan	0	2 SOP 17.950.000	1 SOP 3.007.700	0	0,00% 0,00%	2 SOP 17.950.000	100,00% 100,00%		
2.24.04	2.01.0004	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah daftar arsip hasil penyediaan daftar dan penetapan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup	0	15 arsip 19.467.800	3 arsip 6.103.100	0	0,00% 0,00%	15 arsip 19.467.800	100,00% 100,00%		



Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah (Tribulan I) Tahun 2025
Kabupaten Lamongan

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Nilai kegemaran membaca masyarakat	-	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	66,04	66,24	66,44	66,64	66,21	70,40	70,50	66,64	
2	Persentase ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya	-	-	35%	40%	45%	50%	35,81%	40,02%	45%	50%	
3	Nilai SAKIP Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	-	-	85,48	85,49	85,50	85,51	87,55	87,64	87,64	85,51	

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi PD

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan aksestabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Adapun Isu-isu penting dalam perencanaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan adalah:

Urusan Kearsipan

1. Tingkat kepatuhan publik terhadap kebijakan kearsipan masih rendah;
2. Perlindungan dan penyelamatan arsip belum banyak dilakukan;
3. Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana kearsipan;
4. Pelayanan kearsipan kepada publik masih kurang;
5. Peran arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa belum optimal;
6. Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kearsipan masih rendah;
7. Belum optimalnya implementasi penyusunan perencanaan pemeliharaan, pelestarian dan pengamanan arsip bernilai guna tinggi;
8. Implementasi SPBE bidang kearsipan belum optimal;
9. Sumber daya penyelenggaraan kearsipan belum memadai.

Urusan Perpustakaan

1. Rendahnya budaya literasi masyarakat;
2. Belum optimalnya pelestarian bahan pustaka dan naskah kuno;

3. Belum meratanya penyelenggaraan perpustakaan;
4. Masih rendahnya tingkat kepatuhan penerbit dan produsen rekaman terhadap pelaksanaan UU No. 4/1999 No. 13/2018 tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam;
5. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan kepemilikan dan keberadaan naskah kuno;
6. Kurangnya pengetahuan masyarakat terkait aplikasi layanan digital perpustakaan daerah.

2.4. Penelaahan Perubahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah sebagai lembaga yang bertugas mencerdaskan kehidupan bangsa dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah memiliki Program dan usulan tahun 2025 yang merupakan suatu hasil kajian terhadap program dan kegiatan dari tingkat provinsi. Disamping itu Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan juga merangkum referensi kebutuhan informasi dari masyarakat, perguruan tinggi maupun Perangkat Daerah di Kabupaten Lamongan.

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah sebagai Perangkat Daerah dengan tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kearsipan dan dibidang perpustakaan dimana peran masyarakat sangat penting dalam mendukung semua program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan dalam hal ini mengkoordinasikan program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan yang nantinya ditujukan langsung kepada Perangkat Daerah terkait. Usulan Perubahan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.3.

Tabel 2.3

Usulan Perubahan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Lamongan

Nama PD : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		NIHIL			

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Perubahan Kebijakan Nasional dan Provinsi Kebijakan Nasional

Penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk mewujudkan ketersediaan arsip yang nyata, autentik, utuh dan lengkap, serta terpercaya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, kebangsaan dan kemasyarakatan. Dalam rangka mendukung program pemerintahan tersebut Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) memiliki Sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya kepatuhan publik terhadap kebijakan kearsipan, yang ditandai dengan meningkatnya kepatuhan penyelenggara negara dan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan bidang ke arsip;
2. Meningkatnya ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya secara nasional, yang ditandai dengan meningkatnya ketersediaan arsip di unit pengolah, unit kearsipan, dan lembaga kearsipan;
3. Meningkatnya ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya secara nasional, yang ditandai dengan meningkatnya ketersediaan arsip di unit pengolah, unit kearsipan, dan lembaga kearsipan;
4. Terwujudnya tata kelola yang baik untuk mendukung pelaksanaan tugas teknis di ANRI, yang ditandai dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang hasilnya tergambar dalam perolehan peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi.

Perpustakaan adalah institusi yang mengumpulkan pengetahuan tercetak dan terekam, mengelolanya dengan cara khusus guna memenuhi kebutuhan intelektualitas para penggunanya melalui beragam cara interaksi pengetahuan. Perpustakaan Nasional memiliki sasaran Strategis yaitu "Terwujudnya Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan literasi dan kegemaran membaca", dengan indikator:

1. Nilai kegemaran membaca;
2. Indeks pembangunan literasi masyarakat.

Program Perpustakaan Nasional Tahun 2025-2029 :

1. Penguatan budaya membaca dan peningkatan kecakapan literasi;
2. Pengarus-utamaan naskah nusantara;
3. Standarisasi dan akreditasi perpustakaan.

Kebijakan Provinsi

Tujuan yang termuat dalam RENSTRA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur adalah:

1. Peningkatan kegemaran membaca masyarakat Jawa Timur;
2. Meningkatnya penyelenggaraan kearsipan di Jawa Timur.

Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur merumuskan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pembangunan Uterasi Masyarakat;
2. Meningkatnya Sistem Tertib Administrasi Kearsipan di Lingkungan

3.2. Perubahan Tujuan dan Sasaran PD Tahun 2025

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta mengacu pada tujuan dan sasaran target kinerja Rencana Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025 - 2029, yaitu:

➤ Tujuan

- Peningkatan Budaya Literasi masyarakat dengan indikator kinerja Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
- Meningkatkan Mutu Penyelenggaraan Kearsipan dengan indikator kinerja capaian nilai audit kearsipan eksternal Kabupaten Lamongan

➤ Sasaran

- Meningkatnya literasi dan kegemaran membaca masyarakat, dengan indikator sasaran Nilai kegemaran membaca masyarakat
- Meningkatnya ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya dengan indikator sasaran persentase ketersediaan arsip yang autenti, utuh, dan terpercaya

- Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah dengan indikator sasaran Nilai SAKIP Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tidak ada perubahan tujuan dan sasaran PD di tahun 2025.

3.3. Perubahan Program dan Kegiatan PD Tahun 2025

Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan perubahan program dan kegiatan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah adalah pencapaian visi dan misi Kepala Daerah. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah sebagai lembaga yang berperan serta dalam mensukseskan pendidikan di Kabupaten Lamongan memiliki tugas memberikan bimbingan teknis tentang apa itu Perpustakaan dan bagaimana mengelola perpustakaan supaya berguna bagi masyarakat, melaksanakan pembinaan tentang kearsipan dan audit kearsipan internal bagi seluruh perangkat daerah.

Rekapitulasi perubahan program dan kegiatan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan adalah tidak ada perubahan program dan kegiatan, tetapi berdasarkan perubahan kebijakan dari pusat yakni Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 maka setiap Pemerintah Daerah harus menyesuaikan dan melaksanakan kebijakan tersebut sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia. Dalam menindaklanjuti Instruksi Presiden tersebut, pemerintah kabupaten lamongan telah melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 pada seluruh perangkat daerah di Kabupaten Lamongan.. Adapun Perbandingan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Rencana Kerja PD dan Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Perbandingan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Rencana Kerja PD dan Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2025

NO	RKPD TAHUN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				SELISIH (BERTAMBAH/BE RKURANG)	ALASAN PERUBAHAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
	URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Perangkat Daerah	81,78	6.402.305.168	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Perangkat Daerah	81,78	6.840.720.764	438.416.608	-	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun Tepat Waktu	100%	30.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun Tepat Waktu	100%	24.003.000	-6.997.000	Efisiensi Anggaran	
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	10.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	7.969.900	-2.030.100	Efisiensi Anggaran	
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	8.605.100	-1.394.900	Efisiensi Anggaran	
5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	10.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	7.428.000	-2.572.000	Efisiensi Anggaran	
6	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Jumlah Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	100%	4.656.168.468	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Jumlah Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	100%	6.567.320.684	1.011.152.206	-	
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 Orang/Bulan	4.536.168.458	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 Orang/Bulan	5.553.102.684	1.016.934.206	b	
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	5.000.000	0	-	
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	15.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	9.218.000	-6.782.000	Efisiensi Anggaran	
10	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Prosentase Jumlah Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawalan dengan Baik	100%	10.000.000	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Prosentase Jumlah Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawalan dengan Baik	100%	15.000.000	5.000.000	-	
11	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	5.000.000	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	0	-5.000.000	-	
12	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	85 Orang	5.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	82 Orang	15.000.000	10.000.000	-	
13	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Jumlah Laporan Persediaan Barang dan Jasa yang Tepat Waktu	100%	122.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Jumlah Laporan Persediaan Barang dan Jasa yang Tepat Waktu	100%	102.800.600	-19.199.400	-	
14	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	10.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	10.000.000	0	-	

NO	RKPD TAHUN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				SELISIH (BERTAMBAH/BE RKURANG)	ALASAN PERUBAHAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
	URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	10.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	10.000.000	0	-	
16	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	10.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	10.000.000	0	-	
17	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	20.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	12.748.800	-7.251.400	Efisiensi Anggaran	
18	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	10.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3.832.000	-6.168.000	Efisiensi Anggaran	
19	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 Dokumen	12.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 Dokumen	15.368.000	3.368.000	-	
20	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	50.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	40.854.000	-9.146.000	Efisiensi Anggaran	
21	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang Dibutuhkan	100,00%	12.500.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang Dibutuhkan	100,00%	64.384.400	51.884.400	Efisiensi Anggaran	
22	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	5.000.000	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	0	-6.000.000	Efisiensi Anggaran	
23	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	7.500.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	64.384.400	56.884.400	-	
24	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Jasa Penunjang yang Tersedia dengan Baik	100%	1.210.860.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Jasa Penunjang yang Tersedia dengan Baik	100%	845.145.000	-365.715.000	Efisiensi Anggaran	
25	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4 Laporan	3.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4 Laporan	3.000.000	0	-	
26	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	184.200.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	234.834.000	50.634.000	-	
27	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0	-2.000.000	Efisiensi Anggaran	
28	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.021.660.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	607.311.000	-414.349.000	Efisiensi Anggaran	
29	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Dalam Kondisi Baik	100%	460.776.700	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Dalam Kondisi Baik	100%	222.067.100	-238.709.600	Efisiensi Anggaran	
30	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	75.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	75.000.000	0	-	
31	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit	51.443.100	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit	60.943.100	9.500.000	-	

NO	RKPD TAHUN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				SELISIH (BERTAMBAH/BE RKURANG)	ALASAN PERUBAHAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
	URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	12.000.000	2.000.000	-	
33	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (DED Gedung Perpus)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (DED Gedung Perpus)	3 Unit	324.333.600	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (DED Gedung Perpus)	1 Unit	74.124.000	-250.209.600	Efisiensi Anggaran	
34	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Presentase peningkatan perpustakaan sesuai standart nasional perpustakaan	4,16%	661.660.000	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Presentase peningkatan perpustakaan sesuai standart nasional perpustakaan	4,16%	361.438.500	-290.221.600	-	
35	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Se Kabupaten Lamongan	1.023.952	698.150.000	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Se Kabupaten Lamongan	1.023.952	260.398.900	-347.761.100	-	
36	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	1 Layanan	300.000.000	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	1 Layanan	22.000.000	-278.000.000	Efisiensi Anggaran	
37	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	1 Perpustakaan	22.000.000	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	1 Perpustakaan	100.000.000	78.000.000	-	
38	Pengembangan Koleksi Perpustakaan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Daerah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	25 Eksemplar	10.000.000	Pengembangan Koleksi Perpustakaan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Daerah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	2 Eksemplar	2.378.900	-7.621.100	Efisiensi Anggaran	
39	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	24 Perpustakaan	10.000.000	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	15 Perpustakaan	7.867.600	-2.132.400	Efisiensi Anggaran	
40	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	10 Perpustakaan	7.500.000	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	2 Perpustakaan	1.220.500	-6.279.500	Efisiensi Anggaran	
41	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	15 Orang	10.000.000	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25 Orang	10.000.000	0	-	
42	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi	1 Layanan	19.200.000	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi	1 Layanan	58.400.000	39.200.000	-	
43	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1.184 Eksemplar	211.850.000	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	248 Eksemplar	46.943.800	-165.006.200	Efisiensi Anggaran	

NO	RKPD TAHUN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				SELISIH (BERTAMBAH/BE RKURANG)	ALASAN PERUBAHAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
	URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan	6 Dokumen	7.500.000	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan	2 Dokumen	1.588.100	-5.811.900	Efisiensi Anggaran	
45	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat gemar membaca	14000 Orang	63.500.000	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat gemar membaca	14000 Orang	111.039.600	57.539.600	-	
46	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	30 Lokus	16.500.000	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	45 Lokus	22.580.000	4.080.000	-	
47	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 Perpustakaan	15.000.000	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2 Perpustakaan	56.080.000	43.080.000	-	
48	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten/Kota	2 Orang	5.000.000	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten/Kota	3 Orang	5.619.900	618.900	-	
49	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	1 Perpustakaan	10.000.000	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	1 Perpustakaan	16.759.700	6.769.700	-	
50	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya	1 Orang	5.000.000	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya	1 Orang	8.000.000	3.000.000	-	
51	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Prosentase Koleksi Daerah dan Naskah Kuno yang dilestarikan	93,00%	33.300.000	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Prosentase Koleksi Daerah dan Naskah Kuno yang dilestarikan	93,00%	13.974.800	-19.325.200	Efisiensi Anggaran	
52	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Naskah Kuno yang didata dan dilestarikan	1 naskah kuno	20.000.000	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Naskah Kuno yang didata dan dilestarikan	1 naskah kuno	5.172.400	-14.827.600	Efisiensi Anggaran	
53	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	5 Orang	10.000.000	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	2 Orang	1.600.000	-8.400.000	Efisiensi Anggaran	
54	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalimedian Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalimedian untuk dilestarikan dan didayagunakan	10 Eksemplar	10.000.000	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalimedian Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalimedian untuk dilestarikan dan didayagunakan	2 Eksemplar	3.572.400	-6.427.600	Efisiensi Anggaran	
55	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang terdaftar	2 Judul	13.300.000	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang terdaftar	2 Judul	8.802.400	-4.497.600	Efisiensi Anggaran	
56	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diolah dan dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	10 Eksemplar	8.300.000	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diolah dan dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	10 Eksemplar	5.802.400	-2.497.600	Efisiensi Anggaran	

NO	RKPD TAHUN 2025					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025					SELISIH (BERTAMBAH/BE RKURANG)	ALASAN PERUBAHAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
	URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
57	Pengolahan dan Penyngan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diolah dan dilakukan penyngan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	5 Eksemplar	5.000.000	Pengolahan dan Penyngan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diolah dan dilakukan penyngan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	5 Eksemplar	3.000.000	-2.000.000	Efisiensi Anggaran			
58	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Tingkat Ketersediaan Arsip	90%	92.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Tingkat Ketersediaan Arsip	90%	46.742.600	-46.267.600	-			
59	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang Mempunyai Daftar Arsip Dinamis	82,81%	46.000.000	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang Mempunyai Daftar Arsip Dinamis	82,81%	27.773.300	-17.226.700	-			
60	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dihasilkan dan Digunakan	27 Berkas	12.500.000	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dihasilkan dan Digunakan	27 Berkas	7.802.900	-4.697.100	Efisiensi Anggaran			
61	Pemeliharaan dan Penyusunan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusunan	64 Berkas	5.000.000	Pemeliharaan dan Penyusunan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusunan	27 Berkas	1.593.600	-3.406.400	Efisiensi Anggaran			
62	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Laporan	5.000.000	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Laporan	4.223.500	-776.600	Efisiensi Anggaran			
63	Penyenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah OPD kabupaten/kota dan BUMD kabupaten/kota yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan	67 Lembaga	22.500.000	Penyenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah OPD kabupaten/kota dan BUMD kabupaten/kota yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan	67 Lembaga	14.153.300	-8.346.700	Efisiensi Anggaran			
64	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Arsip Statis yang Telah dibuatkan Sarana Bantu Temu Balik	90%	24.000.000	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Arsip Statis yang Telah dibuatkan Sarana Bantu Temu Balik	90%	9.167.700	-14.842.300	Efisiensi Anggaran			
65	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI	5 Arsip	10.000.000	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI	3 Arsip	2.105.200	-7.894.800	Efisiensi Anggaran			
66	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	50 Arsip	14.000.000	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	30 Arsip	7.052.500	-6.947.500	Efisiensi Anggaran			
67	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Arsip yang Dikelola Melalui Jaringan Informasi Kearsipan	66,67%	23.000.000	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Arsip yang Dikelola Melalui Jaringan Informasi Kearsipan	66,67%	8.811.500	-14.188.500	Efisiensi Anggaran			
68	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JKN	5 Pengguna	13.000.000	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JKN	3 Pengguna	5.160.000	-7.840.000	Efisiensi Anggaran			
69	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	2 Laporan	10.000.000	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	2 Laporan	3.651.500	-6.348.500	Efisiensi Anggaran			

NO	RKPD TAHUN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				SELISIH (BERTAMBAH/BE RKURANG)	ALASAN PERUBAHAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
	URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM			
70	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip sebagai Bahan Pertanggungjawaban	90%	76.000.000	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip sebagai Bahan Pertanggungjawaban	90%	29.085.700	-46.914.300	Efisiensi Anggaran	12
71	Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Persentase OPD yang arsipnya sudah dimusnahkan sesuai dengan NSPK	7,81%	10.000.000	Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Persentase OPD yang arsipnya sudah dimusnahkan sesuai dengan NSPK	7,81%	6.823.400	-4.176.600	Efisiensi Anggaran	
72	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	50 Arsip	5.000.000	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	50 Arsip	2.739.300	-2.260.700	Efisiensi Anggaran	
73	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	50 Berkas	5.000.000	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	50 Berkas	3.084.100	-1.915.900	Efisiensi Anggaran	
74	Perfindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip yang Diselamatkan Akibat Bencana dengan NSPK	40 berkas	20.000.000	Perfindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip yang Diselamatkan Akibat Bencana dengan NSPK	40 berkas	9.359.000	-10.641.000	Efisiensi Anggaran	
75	Evaluasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evaluasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	10 Arsip	10.000.000	Evaluasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evaluasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	5 Arsip	6.550.000	-3.450.000	Efisiensi Anggaran	
76	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	5 Arsip	10.000.000	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	3 Arsip	2.809.000	-7.191.000	Efisiensi Anggaran	
77	Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Persentase Arsip Statis yang Telah Diautentifikasi dan Arsip Hasil Alih Media sesuai dengan NSPK	83,33%	25.000.000	Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Persentase Arsip Statis yang Telah Diautentifikasi dan Arsip Hasil Alih Media sesuai dengan NSPK	83,33%	6.880.200	-15.119.800	Efisiensi Anggaran	
78	Penilaian dan Penetapan Autentitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Autentitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	100 Arsip	10.000.000	Penilaian dan Penetapan Autentitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Autentitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	50 Arsip	2.486.000	-7.504.000	Efisiensi Anggaran	
79	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Pendapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	100 Arsip	15.000.000	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Pendapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	50 Arsip	4.384.200	-10.615.800	Efisiensi Anggaran	
80	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang dinyatakan Hilang	Jumlah Arsip Statis yang Diverifikasi Dinyatakan Hilang	10 arsip	21.000.000	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang dinyatakan Hilang	Jumlah Arsip Statis yang Diverifikasi Dinyatakan Hilang	10 arsip	7.023.100	-13.976.900	Efisiensi Anggaran	
81	Penilaian dan Penetapan Autentitas Arsip Statis yang dinyatakan hilang	Jumlah Daftar Autentitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan	3 Arsip	7.000.000	Penilaian dan Penetapan Autentitas Arsip Statis yang dinyatakan hilang	Jumlah Daftar Autentitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan	3 Arsip	3.368.100	-3.631.900	Efisiensi Anggaran	

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan pada akhir tahun 2025 di lingkup Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2025 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2025. Renja Perubahan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2025 mengacu kepada Rencana Strategis 2025-2029, yang telah memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, memuat permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan program dan kegiatan, serta telah mengakomodir usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Optimalisasi dalam pelaksanaan Isi Renja Perubahan merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran sesuai dengan kewenangan urusan bidang kearsipan dan perpustakaan yang diemban oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan sebagai salah satu organisasi perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Lamongan. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Renja Perubahan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan.

4.2 Catatan Penting Yang Perlu Mendapat Perhatian

Adanya gerakan tertib arsip yang dicanangkan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) yang harus menjadi perhatian penting untuk Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan. Untuk mewujudkan gerakan tersebut, maka dibutuhkan SDM yang kompeten dalam bidang kearsipan, serta sarana dan prasarana kearsipan yang memadai dan mendukung proses tersebut. Sedangkan, di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten

Lamongan hanya ada beberapa SDM yang Kompeten di bidang kearsipan dan sarana prasarana yang kurang memadai untuk mewujudkan gerakan tersebut.

Untuk urusan perpustakaan yaitu kurangnya kesadaran masyarakat akan literasi dan pentingnya budaya gemar membaca serta keberadaan perpustakaan umum yang kurang merata sehingga masyarakat yang ada di pedesaan kurang bisa untuk mengakses layanan perpustakaan umum meskipun sudah ada perpustakaan digital i-Lamongan. Pembinaan perpustakaan yang kurang maksimal karena keterbatasan anggaran dan SDM sehingga hal tersebut harus menjadi perhatian dari semua pihak terkait.

4.3 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi, misi daerah.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, Bidang, Kelompok Jabatan Fungsional dan seluruh staf Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan secara bersama-sama mempunyai tanggungjawab untuk:
 - a. Melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2025.

4.4 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Tahun 2025, selanjutnya Perubahan Renja Tahun 2025 akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran (RKPA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran Sementara (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Lamongan, April 2025

Kepala Dinas
Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah
Kabupaten Lamongan



drg. F.da Nuraida, M.Kes.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660219 199303 2 007

